

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMANEGERI 10 DI KOTA PONTIANAK

Ade Risna Sari¹, Martoyo², Isdairi³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Implementasi kurikulum 2013 di SMPN 10 Pontianak belum dapat berjalan efektif yang dapat dilihat pendekatan studi implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang menjelaskan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yakni (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi, dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Deskripsi masing-masing variabel yang dimaksud adalah : a) komunikasi, dimana sosialisasi dan pelatihan guru tentang kurikulum 2013 belum cukup bahkan masih banyak guru yang belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan sehingga hakikat dan esensi kurikulum 2013 belum dapat dipahami secara utuh ; b) sumber daya, dimana kompetensi guru sebagai implementor kurikulum 2013 masih banyak yang kurang serta buku-buku teks yang belum semuanya ada ; c) disposisi, dimana beberapa guru masih menggunakan kurikulum lama dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran kurikulum 2013 belum dapat terealisasi ; d) struktur birokrasi, dimana belum ada standar penilaian sikap dan psikomotor siswa yang baku serta belum ada standar deskripsi penilaian dalam rapor. Berdasarkan kondisi demikian, Departemen Pendidikan Kota Pontianak perlu mengadakan pelatihan yang lebih intensif dan maksimal lagi kepada para guru secara menyeluruh supaya guru-guru lebih dapat memahami esensi, hakikat dan tujuan kurikulum 2013 dan segera melengkapi buku pegangan guru dan buku-buku teks kurikulum 2013.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Kurikulum, Pendidikan.

¹ Swasta

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kurikulum merupakan elemen strategis dalam sebuah layanan program pendidikan dan komponen pendidikan yang dijadikan acuan bagi segenap pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program atau setiap satuan pendidikan, baik itu oleh pengelola maupun penyelenggara khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Kurikulum yang baik semestinya akan menghasilkan proses dan produk pendidikan yang baik, dan sebaliknya kurikulum yang buruk akan membuahkan proses dan hasil pendidikan yang jelek pula. Kurikulum merupakan komponen penting dari sistem pendidikan. Kurikulum dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat yaitu antara kurikulum dan pendidikan mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Apabila tujuan tersebut hendak tercapai maka harus ada sarana isi yaitu kurikulum yang dijadikan dasar acuan yang relevan, artinya sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut, hal ini dapat diartikan bahwa kurikulum dapat membawa kita ke arah tercapainya tujuan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 36 ayat (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Munculnya kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang bersifat sentralistik berubah ke pendidikan desentralistik dilatarbelakangi oleh perubahan dan tuntutan masyarakat dalam dimensi global.

Kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum lama yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 merupakan penyempurnaan kurikulum lama dan diharapkan pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dengan kata lain kompetensi lulusan yang diharapkan dalam kurikulum 2013 adalah adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap (afektif), keterampilan (psikomotor) dan pengetahuan (kognitif). Kurikulum 2013 mengharapakan dan mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan (mempersentasikan) apa yang diperoleh atau diketahui setelah mereka menerima materi pembelajaran. Implementasi kurikulum merupakan penelitian lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri.

Kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan Kurikulum KTSP 2006 dikarenakan rata-rata kemampuan berfikir anak Indonesia secara ilmiah dianggap masih rendah dan anak-anak malas mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya karena kemampuan berfikir mereka dibelenggu pada hal-hal yang sifatnya biner. Menurut hasil studi lembaga survei pendidikan Internasional, *Trends in International Mathematic and Science Study* (TIMSS) dan *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS) 2011 tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap kemampuan siswa di Indonesia. Kemampuan matematika siswa di Indonesia tidak meningkat dilihat dari hasil studi TIMSS pada 2007 dan 2011. Sebagian besar siswa hanya mampu mengerjakan soal sampai level menengah saja

sehingga disinyalir ada perbedaan bahan ajar di Indonesia dengan yang diujikan di tingkat Internasional. Begitu juga dengan kemampuan sainsnya. Hal ini diduga ada ketidaksesuaian antara kompetensi dasar KTSP dengan materi TIMSS. Perubahan akan disempurnakan pada kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013, dimana kompetensi dasar yang ada akan mengikuti standar kompetensi lulusan. Tujuan pembelajarannya dirumuskan dulu baru disiapkan komponennya. Hal ini kebalikan dari Kurikulum KTSP dimana standar kompetensi lulusannya diletakkan di belakang.

Kurikulum 2013 menuntut peran lebih guru sebagai implementornya, dimana tujuan dari kurikulum ini diharapkan peserta didik berhasil mencapai dan memiliki pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor) untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut diperlukan guru yang benar-benar kreatif dan kompeten dalam proses pembelajaran baik dalam mempersiapkan materi ajar, metode pembelajaran yang tepat, mengevaluasi hasil pembelajaran dan sebagainya. Sikap mental guru dan komitmen yang tinggi juga sangat diperlukan dalam mengimplementasi kurikulum 2013. Proses implementasi Kurikulum 2013 guru sudah disiapkan silabusnya dari pusat, sehingga guru tidak repot lagi membuat silabus. Silabus dibuat oleh pusat dikarenakan kemampuan guru yang tidak sama dalam membuat silabus sehingga pada Kurikulum KTSP banyak guru yang *mengcopy paste* silabus dan hasilnya beragam karena masing-masing satuan pendidikan mempunyai silabus yang berbeda-beda.

SMPN 10 kota Pontianak menjadi salah satu sekolah yang menjadi sasaran untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Para guru dan kepala sekolah harus mempersiapkan diri untuk hal itu. Mereka harus mendukung kebijakan pemerintah tentang kurikulum sekolah yang baru ini agar tujuannya dapat tercapai dengan baik. Guru SMPN 10 harus mempersiapkan diri dalam hal memahami silabus, membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik dan benar, menyiapkan bahan ajar, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, melakukan penilaian (evaluasi) hasil pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk sikap mentalnya agar implementasi kurikulum 2013 efektif. Dalam hal ini beberapa gurunya sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum 2013. Sebagian lagi menunggu giliran pelatihan. Buku-buku pegangan buat guru dan buku-buku teks untuk siswa belum semuanya ada. Kepala sekolah berinisiatif menyediakan buku pegangan buat guru sendiri. Untuk beberapa buku-buku teks siswa dibeli dari penerbit dan belum semua buku teks mata pelajaran ada. Namun kurikulum 2013 ini harus tetap diimplementasikan di SMPN 10 kota Pontianak di tahun pertama ini.

2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah penelitian ini adalah mengenai kesiapan guru dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 10 kota Pontianak yang dikaji dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

3. Perumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 10 kota Pontianak ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Ada beberapa pendapat ahli tentang implementasi kebijakan diantaranya Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) mengatakan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni (1) standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. (2) sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*). (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. (4) karakteristik agen pelaksana.

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ; sejauh mana dukungan bagi implementasi kebijakan ; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak ; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan ; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. (6) Disposisi Implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan ; (b) kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan ; (c) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor (AG. Subarsono, 2006 : 99-100).

Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengatakan ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni (1) kondisi lingkungan; (2) hubungan antar organisasi ; (3) sumber daya organisasi untuk implementasi program ; (4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. (AG. Subarsono , 2006 : 101 -102).

David L. Weimer dan Aidan R. Vining berpandangan bahwa ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni (1) logika kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis. Kita dapat berpikir bahwa logika dari suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu hipotesis. (2) lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu tetapi ternyata gagal diimplementasikan di daerah lain karena kondisi lingkungan yang berbeda. (3) kemampuan implementor kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. (AG. Subarsono, 2006 : 103–104).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*). Mudah / tidaknya masalah dikendalikan : kesulitan teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, prosentase kelompok

sasaran dibanding jumlah populasi, dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. (2) karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*). Kemampuan kebijaksanaan untuk menstruktur proses implementasi : kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal yang memadai, ketepatan alokasi sumber daya, keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana dan akses formal pihak luar. (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi : kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana. (AG. Subarsono, 2006 : 94 – 99)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup : (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan ; (2) tipe / jenis manfaat yang diterima oleh target group ; (3) sejauh mana derajat perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program ; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat ; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci ; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai / sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan variabel lingkungan implementasi mencakup (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ; (2) karakteristik lembaga / institusi dan rejim / penguasa yang sedang berkuasa ; (3) tingkat kepatuhan dan daya tanggap / responsivitas kelompok sasaran. (AG. Subarsono, 2006 : 93 – 94).

George C. Edwards III mengemukakan bahwa salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak seperti apa yang menjadi prasyarat bagi kebijakan dan apa yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yakni (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Variabel Komunikasi menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Variabel kedua adalah sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di atas kertas saja. Disposisi merupakan variabel selanjutnya dalam implementasi kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti

komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Variabel yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasional standar (SOP). SOP (*standard operating procedures*) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (AG. Subarsono, 2006 : 90 – 92).

Dari gambar model pendekatan di atas dapat dikatakan bahwa faktor komunikasi dan sumber daya dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 10 kota Pontianak dapat dikatakan sebagai *direct impact* sedangkan disposisi dan struktur birokrasi menjadi *indirect impact* dalam proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 10 kota Pontianak. Dalam hal ini yang paling kuat mempengaruhi proses implementasi kurikulum 2013 di SMPN 10 kota Pontianak adalah aspek sumber daya dimana guru adalah sebagai implementornya. Namun tiga aspek lain turut mempengaruhi proses implementasi tersebut.

2. Implementasi Kurikulum

Sebuah kurikulum yang telah dikembangkan tidak akan berarti (menjadi kenyataan) jika tidak diimplementasikan, dalam artian digunakan secara aktual di sekolah dan dikelas. Dalam implementasi ini, tentu saja harus diupayakan penanganan terhadap pengaruh faktor-faktor tertentu, misalnya kesiapan sumber daya, faktor budaya masyarakat, dan lain-lain. Berbagai dimensi implementasi kurikulum yang penting untuk dicermati adalah materi kurikulum, struktur organisasi kurikulum, peranan atau perilaku, pengetahuan dan internalisasi nilai. Keberhasilan implementasi terutama ditentukan oleh aspek perencanaan dan strategi implementasinya. Pada prinsipnya implementasi ini mengintegrasikan aspek-aspek filosofis, tujuan, *subject matter*, strategi mengajar dan kegiatan belajar serta evaluasi dan *feedback* (Oemar Hamalik, 2013 : 190).

Faktor-faktor yang menentukan dan mendukung keberhasilan implementasi kurikulum dalam meningkatkan pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik sebagai lulusan yang kompeten sebagai berikut : (a) kesesuaian kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dengan kurikulum dan buku teks; (b) Ketersediaan buku sebagai sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum; (c) penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan; (d) penguatan manajemen dan budaya sekolah. (Sholeh Hidayat, 2013 : 156).

Miller dan Seller mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Implementasi kurikulum merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum, dan peserta didik sebagai subjek belajar. (Mulyasa, 2009 : 179)

Mulyasa menjelaskan bahwa implementasi kurikulum setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor berikut : a) Karakteristik kurikulum ; yang mencakup

ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan ; (b) Strategi implementasi ; yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, penataran, loka karya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengguna kurikulum di lapangan ; (c) Karakteristik pengguna kurikulum ; yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum (*curriculum planning*) dalam pembelajaran. (Mulyasa, 2009 : 179 - 180)

Mars mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal yang datang dari dalam diri guru sendiri. Dari berbagai faktor tersebut guru merupakan faktor penentu disamping faktor-faktor lain. (Mulyasa, 2009 : 180). Nana Syaodih Sukmadinata mengatakan bahwa hambatan dalam implementasi kurikulum (1) terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, hal ini disebabkan oleh kurangnya waktu, kekurangsesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah serta karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri ; (2) hambatan lain datang dari masyarakat. Untuk pelaksanaan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah. Keberhasilan pendidikan, ketepatan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan, serta input fakta dan pemikiran dari masyarakat ; (3) masalah biaya. Pelaksanaan kurikulum yang berbentuk kegiatan eksperimen baik metode, isi atau sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2010 : 160-161).

Ornstein & Hunkins mengatakan bahwa implementasi kurikulum adalah sebuah perubahan, dan perubahan bagi banyak orang adalah menyenangkan apabila mempunyai efek menguntungkan dan menyengsarakan apabila memberatkan. Banyak kurikulum baru yang gagal dalam implementasi karena ketiadaan suatu rencana perubahan dalam keseluruhan suatu sistem persekolahan. (S. Nasution, 2011 : 182). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 36 ayat (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di SMPN 10 kota Pontianak yang terletak di jalan WR.Supratman Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak selatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*), dan dokumentasi serta triangulasi dengan alat berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, kamera dan *tape recorder*. Penentuan subyek penelitian (*informan*) menggunakan teknik *purposive* atau sampel bertujuan yang terdiri dari :

1. Sepuluh orang guru, dimana ada tujuh mata pelajaran pada kelompok A dan tiga mata pelajaran di kelompok B ;
2. Kepala sekolah ;
3. Wakasek urusan kurikulum ;

4. Tiga puluh orang siswa SMPN 10 kota Pontianak ;
5. Ketua Komite Sekolah SMPN 10 kota Pontianak;
6. Supervisor (pengawas sekolah) Dikbud kota Pontianak;
7. Kepala bagian kurikulum Dikbud kota Pontianak.

Obyek penelitian adalah kesiapan guru dalam implementasi kurikulum 2013 di SMPN 10 kota Pontianak dimana guru dituntut untuk bisa merubah *mindset* dari penceramah menjadi fasilitator dan motivator siswa.

D. HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Kurikulum 2013 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Pontianak

a. Struktur Kurikulum 2013

SMPN 10 Pontianak dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 sesuai dengan Struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten / mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten /mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.

Struktur kurikulum adalah gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar siswa yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Beban belajar siswa di SMPN 10 kota Pontianak untuk kelas VII adalah 38 jam per minggu dan lamanya jam belajar adalah 40 menit

Implementasi kurikulum 2013 SMPN 10 Pontianak mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah sesuai dengan permendikbud. Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills*.

Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (organisasi elemen) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal Kompetensi Dasar. Organisasi vertikal Kompetensi Dasar adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan konten Kompetensi Dasar dari

mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (kompetensi inti 1), sikap sosial (kompetensi inti 2), pengetahuan (kompetensi inti 3), dan penerapan pengetahuan (kompetensi 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (kompetensi kelompok 3) dan penerapan pengetahuan (kompetensi inti kelompok 4).

Kompetensi Inti yang sesuai dengan kurikulum 2013 diimplementasikan SMPN 10 Pontianak kelas VII adalah sebagai berikut :

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. (sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI)

Kompetensi Dasar SMPN 10 Pontianak untuk setiap mata pelajaran mencakup : Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, serta Prakarya.

2. Proses Implementasi Kurikulum 2013 di SMPN 10 Pontianak

Sejak bulan Juli 2013 sampai Juli 2014 SMPN 10 Pontianak melaksanakan kurikulum 2013. Adapun yang melaksanakan kurikulum 2013 ini adalah kelas 7 (tujuh) sebanyak 6 kelas yaitu kelas 7 A, 7 B, 7 C, 7 D, 7 E, dan 7 F. Masing-masing kelas berjumlah 40 siswa. Ruang kelas cukup besar dan penerangan cukup terang serta suasana kelas yang relatif nyaman dengan kipas angin sebagai penyejuk. Ruang kelas berkeramik bersih. Meja dan kursi tertata rapi. Setiap bangku ditempati 2 (dua) siswa dan ada juga model bangku dan meja hanya untuk 1 (satu) orang siswa saja.

Guru-guru yang mengajar di kelas 7 ini ada yang sudah mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum 2013 dan ada yang belum mengikuti sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013. Namun demikian walaupun belum semua guru mendapatkan pelatihan dan sosialisasi tentang kurikulum 2013 tersebut implementasinya harus tetap berjalan karena SMPN 10 Pontianak sudah terpilih sebagai Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di kota Pontianak yang menjadi sasaran implementasi kurikulum baru ini.

Dalam proses implementasi kurikulum 2013 SMPN 10 kota Pontianak mengacu pada 8 (delapan) standar nasional pendidikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan. Adapun 8 standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Untuk indikator standar isi di SMPN 10 kota Pontianak sudah terpenuhi seperti membuat kalender akademik, program semester, program tahunan, melengkapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyiapkan guru Bimbingan Konseling, mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan kegiatan remedial dan pengayaan. Guru-guru SMPN 10 kota Pontianak menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar. Untuk RPP kurikulum 2013 ini beberapa guru mendapatkannya di pelatihan Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan ada yang membuat sendiri. Ada pula yang mengambil dari buku teks atau LKS dari penerbit buku. Biasanya pengalaman tahun lalu mereka mengunduh dari internet, namun kemaren RPP kurikulum 2013 belum dapat terakses sedangkan silabus kurikulum 2013 ini sudah disiapkan dari pusat. Perangkat Pembelajaran yaitu silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selalu diusahakan lengkap dengan berbagai cara baik itu *mendownload* dari internet dan *mengcopy* dari teman sejawat serta dapat dari pelatihan. Namun sejauh ini rencana pembelajaran tersebut masih dalam tataran dokumen bukan menjadi *guide* pelaksana pembelajaran di kelas. Hal ini dikarenakan karena implementasi kurikulum 2013 di SMPN 10 Pontianak baru berjalan setahun.

Standar kependidikan dan Tendik SMPN 10 kota Pontianak sudah memenuhi indikator dimana 75% guru-guru berkualifikasi S1. Walaupun ada guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang ijazah. Kepsek berpengalaman sebagai pendidik dan cukup aktif melaksanakan supervisi. Guru-guru berperilaku baik. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini SMPN 10 kota Pontianak sudah memiliki ruang belajar yang representatif dan masih dilakukan pembangunan dan renovasi penambahan ruang belajar. SMPN 10 kota Pontianak mempunyai mushola, lapangan basket, lapangan volly, lapangan badminton. SMPN 10 kota Pontianak telah memiliki ruang perpustakaan, ruang multi media, laboratorium IPA, laboratorium komputer, ruang musik, ruang UKS, ruang BK serta aula yang cukup memadai. Penggunaan sarana dan prasarana sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 ada yang dipakai dan ada yang tidak begitu diperlukan seperti penggunaan infokus dalam pemberian materi di dalam kelas. Guru masih mengandalkan papan tulis dan kapur atau *white board* dan spidol untuk menulis dan menerangkan materi pelajaran. Hampir semua guru masih menggunakan alat peraga menggunakan kertas manila atau karton dalam memberikan materi pelajaran di dalam kelas. Penggunaan teknologi seperti infokus, laptop, *compact disk* (CD) dan *tape recorder* jarang dipakai walaupun alat-alat tersebut ada beberapa buah di sekolah tersebut. Hal ini dikarenakan ada beberapa guru yang masih belum bisa menggunakan laptop dan infokus sehingga mereka masih menggunakan cara-cara lama sebagai alat bantu ajar mereka. Untuk beberapa indikator standar pengelolaan tersebut SMPN 10 kota Pontianak sudah memenuhi persyaratan. Kegiatan Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) sering diadakan oleh SMPN 10 Pontianak. Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas guru mata pelajaran. SMPN 10 kota Pontianak selalu berusaha melengkapi indikator standar pembiayaan yang disyaratkan seperti membuat rencana kerja anggaran sekolah, memiliki data pembayaran gaji, memiliki anggaran pembiayaan ujian semester, ujian sekolah dan ujian nasional dan memiliki data sumber dana yang jelas dan teratur. Dalam hal ini SMPN 10 kota Pontianak mendapat perhatian dari pemerintah kota Pontianak.

SMPN 10 kota Pontianak sudah memenuhi hampir semua indikator dari standar penilaian. Untuk kriteria ketuntasan minimal (KKM) setiap mata pelajaran ditetapkan 80 (delapan puluh). Namun untuk kriteria penilaian sikap (afektif) dan pengetahuan (psikomotor) setiap siswa dalam kelas para guru masih bingung karena belum ada format yang standar mengenai hal ini. Begitu pula dengan pengisian rapor belum ada diskripsi yang standar sehingga para guru berinisiatif membuat daftar penilaian sikap dan pengetahuan siswa secara mandiri dan membuat diskripsi sendiri di rapor sehingga diskripsi di rapor beragam kalimatnya.

Implementasi kurikulum 2013 ini SMPN 10 kota Pontianak masih dalam tahap uji coba atau dalam proses pembelajaran. Guru-guru masih menggunakan metode pembelajaran lama sehingga keterlibatan siswa aktif masih kurang dalam proses belajar mengajar. Guru-guru belum semuanya melaksanakan proses pembelajaran CTL. Proses pembelajaran kontekstual (CTL) merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial dan kultural), sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan/ konteks ke permasalahan/konteks lainnya. Untuk media pembelajaran lingkungan juga masih kurang diterapkan, kecuali untuk mata pelajaran IPA. Proses pembelajaran pembiasaan melatih siswa berfikir kritis, kreatif dan inovatif masih dalam proses pembelajaran. Hal ini butuh waktu yang lama untuk menuju ke arah yang diinginkan oleh standar kompetensi lulusan. Dalam implementasinya di dalam proses pembelajaran sebagian guru sudah menerapkan metode ajar yang diisyaratkan oleh kurikulum 2013 dimana siswa lebih aktif dikelas. Sebagian guru lainnya masih menggunakan metode ajar yang lama yaitu guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi.

Kurikulum 2013 menuntut perubahan proses pembelajaran yang lebih mengedepankan murid melakukan pengamatan, bertanya, dan mengeksplorasi, dan mencoba. Keaktifan siswa bertanya saat belajar. Selain keaktifan bertanya komponen lain yang akan masuk dalam standar penilaian adalah proses dan hasil observasi siswa terhadap suatu masalah yang diajukan guru kemudian kemampuan siswa menalar suatu masalah sehingga anak terus diajak untuk berfikir logis. Tak mudah mengubah paradigma guru dari penceramah menjadi fasilitator atau motivator. Dalam hal ini metodologi pembelajaran guru berubah. Paradigma atau *mindset* guru dalam praktek pembelajaran di SMPN 10 Pontianak masih berjalan seperti biasanya, walaupun sudah ada beberapa guru yang sedikit demi sedikit sudah mulai mengubah *mindset* tersebut.

Pola pembelajaran guru menulis di papan tulis dan murid mencatat di buku atau guru menerangkan sedangkan murid mendengarkan, kemudian berubah menjadi proses pembelajaran yang lebih mengedepankan murid untuk melakukan pengamatan, bertanya, mengeksplorasi, mencoba, dan mengekspresikan. Dalam hal ini SMPN 10 Pontianak masih berproses, karena kurikulum 2013 ini ibarat masih

seumur jagung diimplementasi di sekolah ini. Perubahan *mindset* guru tak bisa dilakukan dalam waktu singkat melainkan butuh waktu bertahun-tahun. Sementara kurikulum 2013 harus dilaksanakan dalam waktu secepatnya. Perubahan *mindset* harus dilakukan terus dengan cara mendorong guru untuk terus belajar. Sasaran utama sebuah reformasi kurikulum adalah perbaikan kualitas siswa, maka yang menentukan keberhasilannya adalah proses pembelajaran yang langsung dipimpin oleh guru. Guru di tingkat sekolah menengah pertama dituntut untuk dapat menguasai implementasi perubahan kurikulum dalam setiap mata pelajaran.

Penyelenggaraan proses pembelajaran dengan landasan kurikulum yang baru, guru pasti akan tetap dipengaruhi oleh cara mereka menerapkan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang sebelumnya. Untuk sampai pada tingkat penetapan di kelas maka guru akan menentukan tujuan pada tingkat satuan di kelas, menentukan, teknik mengajar, menentukan materi ajar sebagai alat untuk mencapai tujuan, serta membuat alat ukur untuk mengevaluasi keberhasilan apa yang diajarkan. Fakta yang saya temukan di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya guru di SMPN 10 Pontianak masih menganut pola ajar buku *text* dan menghabiskan isinya. Sebagian besar guru mengandalkan buku *text* yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan penerbitan, bahkan dokumen kurikulum atau KTSP nyaris tak tersentuh. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pun nyaris sekedar menjadi dokumen pelengkap akreditasi. Ketika masuk kelas guru lantas minta siswa membuka buku dan kemudian menerangkan bagian yang menurut guru perlu diterangkan dan diakhiri dengan minta siswa mengerjakan soal-soal. Pada umumnya kita tidak melihat adanya proses interaksi yang mengaktifkan siswa berfikir kritis. Fenomena kurikulum 2013 yang disuarakan untuk menyiapkan anak-anak agar mampu bersaing di abad 21 tampaknya masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini karena pada tahun pertama ini merupakan tahun uji coba implementasinya. Fenomena ini terjadi pula di SMPN 10 Pontianak dalam mengimplementasikan kurikulum sekolahnya.

Implementasi kurikulum 2013 di SMPN 10 Pontianak jika dilihat dari fokus pembelajaran yang paradigmanya ke materi / isi bergeser ke proses dimana paradigma ini meminta setiap pembelajaran di kelas agar dapat menghasilkan siswa yang berkompentensi. Ketuntasan pembelajaran siswa di kelas lebih diukur dari penyelesaian materi yang diajarkan masih berjalan seperti kurikulum KTSP kemaren. Belum ada perubahan yang signifikan dalam hal ini di SMPN 10 Pontianak.

Jika dilihat dari hak mengajar yang selama ini paradigmanya dimiliki guru bergeser ke siswa sudah ada beberapa guru yang telah menerapkan. Dari segi ekspektasi pembelajaran yang paradigmanya tentang apa akan bergeser ke seperti apa dan bagaimana dimana pembelajaran yang memberikan pengetahuan belaka hanyalah akan menghasilkan siswa yang pandai berkomentar saja tanpa tahu bagaimana bersikap dan berbuat. Siswa yang mengandalkan hapalan dan pandai menjawab soal-soal ujian tertulis seperti yang banyak terjadi saat ini. Dalam hal ini SMPN 10 masih berproses untuk menuju ke arah ekspektasi pembelajaran yang diinginkan kurikulum 2013.

Pengajaran guru yang selama ini paradigmanya bagaikan seorang ahli (*expert*) akan bergeser ke fasilitator. Sebagaimana sumber belajar saat ini bukan hanya dari guru akan tetapi bisa didapat dari alam, internet, buku. Dalam kurikulum 2013 ini guru diminta untuk bisa kreatif mengajari siswanya mau dan bisa belajar menguasai materi-materi bukan lagi guru yang mengajari materi-materinya. Guru-guru SMPN 10 dalam pelaksanaannya hampir semua guru masih menggunakan

metodologi pengajaran lama. Hal ini dikarenakan beberapa guru belum memahami keinginan dari kurikulum 2013 ini.

Siswa yang selama ini paradigmanya pasif akan bergeser ke siswa yang aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, yaitu paradigma yang menjelaskan bahwa siswalah yang belajar sehingga dialah yang akan melakukan sesuatu sampai apa yang ingin diketahuinya dicapai, bukan belajar hanya mendengarkan penjelasan guru dan berikutnya menjawab soal. Hal ini belum begitu nampak perubahan terhadap siswa-siswa di SMPN 10 Pontianak saat ini dikarenakan kurikulum 2013 masih terlalu dini diimplementasikan dengan kata lain masih dalam proses menuju arah tersebut.

Paradigma kesalahan dalam pembelajaran yang selama ini tabu akan bergeser menjadi kesalahan sebagai *tools* pembelajaran. Siswa yang sedang belajar tentulah banyak melakukan kesalahan, namun apakah belajar selalu harus dari yang benar bisa saja guru menjadikan sebuah kesalahan untuk menjadi pembelajaran yang tidak boleh dicontoh oleh siswanya. Dalam hal ini implementasi di SMPN 10 Pontianak masih berproses.

Kelas yang paradigmanya selama ini diprogram secara kaku akan bergeser ke kelas yang fleksibel dan mengakomodasi fenomena terkini. Belajar harus berada di kelas dengan aturan yang mengharuskan siswa untuk mengikuti materi seperti dalam buku menjadi tidak membumi dimana tantangan perkembangan jaman yang begitu cepat harus dijawab guru agar para siswanya bisa berperan menjadi manusia seutuhnya dalam mengikuti modernisasi dunia. Implementasi di SMPN 10 Pontianak dalam hal ini masih dalam proses ke arah tersebut.

Penekanan pembelajaran yang selama ini lebih menonjolkan teori akan bergeser ke pembelajaran yang lebih menekankan bagaimana siswa bisa melakukan. Untuk itu tepatlah bila jam pembelajaran dalam kurikulum 2013 akan memerlukan waktu yang lebih lama karena kurikulum 2013 kompetensi yang harus dicapai siswa tidak hanya tergantung pengetahuan atau teori saja tetapi juga sikap dan ketrampilan. Selama penelitian yang saya temukan di SMPN 10 Pontianak ini keluhan beberapa guru mengenai kekurangan jam pembelajaran terutama dalam metode pembelajaran yang bersifat diskusi dan presentasi tidak semua siswa yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka.

Implementasi kurikulum 2013 di SMPN 10 Pontianak dalam prosesnya mendapat dukungan dari pemerintah kota Pontianak dalam hal sosialisasi dan pelatihan para guru. Di samping itu SMPN 10 Pontianak dianggap sudah mampu untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 dilihat dari akreditasi sekolah dengan peringkat A dan masuk dalam dalam 3 (tiga) besar peringkat akademiknya di kota Pontianak. Dilihat dari sarana dan prasarana sekolahnya juga telah mendukung untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kurikulum 2013 di sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 10 kota Pontianak adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Mengacu pada teori implementasi Edward III yang mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ; dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat

faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Ditegaskan oleh Edward III bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

3. Faktor-fakto yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum 2013 di SMPN 10 Pontianak

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi kurikulum 2013 di SMPN 10 kota Pontianak menunjukkan bahwa, sudah sebagian guru mendapat sosialisasi baik berupa pelatihan secara umum maupun secara teknisnya. Dinas Pendidikan kota Pontianak sudah mengadakan sosialisasi dan pelatihan terhadap sebagian guru yang dilakukan secara bertahap. Namun pelatihan tersebut dirasakan oleh para guru masih belum cukup dan masih perlu pelatihan lagi karena sebagian guru masih belum dapat mengimplementasi kurikulum 2013 ini dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan dalam pelatihan tersebut Dinas pendidikan kota Pontianak dianggap hanya memberikan gambaran umum saja tentang kurikulum 2013 tersebut. Secara teknik dan mendetil tentang kurikulum 2013 ini masih belum menyentuh dan masih belum dapat dipahami oleh sebagian guru. Dengan kata lain isi kurikulum 2013 ini belum dapat dipahami secara utuh oleh sebagian guru yang sudah mendapatkan sosialisai dan pelatihan.

b. Faktor Sumber Daya

Dilihat dari faktor Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Dalam hal ini para guru adalah sebagai implementor kurikulum 2013, dalam implementasinya masih ada guru SMPN 10 kota Pontianak yang belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum 2013 ini. Namun karena SMPN 10 kota Pontianak sudah menjadi target sasaran sebagai salah satu sekolah untuk melaksanakan implementasi kurikulum 2013 mau tidak mau siap tidak siap mereka harus mengimplementasikannya sehingga dalam proses implementasi sebagian guru dan hampir semua guru masih mengacu pada kurikulum lama baik dalam hal metode pembelajaran, bahan ajar dan penilaian terhadap siswa. Bahkan dalam kegiatan Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang rutin dilaksanakan masih ada guru yang bukan bidang studinya mengikuti pelatihan di mata pelajaran tersebut sehingga tidak kompeten dengan pelatihan yang dia dapatkan dan bahkan guru bidang studi yang seharusnya mendapatkan pelatihan malah tidak dimasukkan dalam pelatihan sehingga guru-guru yang belum dapat pelatihan mau tidak mau harus mencari informasi sendiri tentang maksud dan tujuan serta hakikat kurikulum 2013 tersebut dan mencari perangkat ajar dan sebagainya.

c. Faktor Disposisi

Faktor disposisi ini sangat penting dimana dalam hal ini *mindset* para guru SMPN 10 kota Pontianak sebagian besar masih menggunakan pola ajar lama yaitu menghabiskan materi ajar sesuai silabus dan RPP dan memberikan penilaian terhadap siswa setiap habis Bab di setiap buku. Dan ada sebagian gurunya bersikap masa bodoh dengan kehadiran kurikulum 2013 ini dimana guru tersebut beranggapan bahwa kurikulum lama dengan kurikulum baru sama saja yang penting dia mengajar dan materi ajarnya selesai tanpa memperdulikan perubahan kurikulum tersebut. Namun ada beberapa guru yang menanggapi positif dan antusias dengan kurikulum 2013 ini. Merubah *mindset* guru perlu proses dan waktu. Dalam implementasi ini perubahan *mindset* guru SMPN 10 masih belum nampak.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dalam konteks ini implementasi kurikulum 2013 di SMPN 10 Pontianak ditemui bahwa guru masih bingung dalam hal pedoman penilaian sikap dan psikomotor siswa di dalam proses pembelajaran. Guru merasa belum ada standar diskripsi penilaian dalam rapor. Masing-masing guru menggunakan kalimatnya sendiri dalam pengisian diskripsi di rapor. Begitu juga dalam standar penilaian sikap dan keterampilan para siswa di kelas masing-masing guru membuat kalimat sendiri dalam penilaiannya. Dinas pendidikan dan kebudayaan kota Pontianak dalam pelatihan tidak menjelaskan secara detil cara penilaian tersebut.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang sudah diuraikan diatas, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kurikulum 2013 yaitu mengubah *mindset* guru. Mengubah *mindset* guru bisa menjadi sumber kegagalan implementasi Kurikulum 2013. Persoalannya adalah perubahan *mindset* guru tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, melainkan butuh waktu bertahun-tahun, padahal kurikulum 2013 itu harus dilaksanakan dalam waktu secepatnya. Pelatihan yang dilakukan sekedar sebagai sosialisasi kurikulum baru tanpa menyertakan pola pendekatan ajar di kelas secara kongkrit akan menjadi penghalang terbesar tercapainya tujuan perubahan kurikulum.

Sedikitnya ada tiga alasan penting mengapa kurikulum 2013 tidak akan dapat mencapai sasaran yang dicanangkan. Pertama tentunya proses pengembangan kurikulum yang tidak didahului oleh *riset* yang menyeluruh. Selanjutnya adalah anggapan bahwa dengan dibuatkan silabus dari pusat guru tidak akan repot lagi menyusunnya sendiri dan terakhir adalah pengutamaan penyusunan materi ajar sebagai salah satu solusi atas kesuksesan implementasi kurikulum. (Kompas.com 22 Desember 2012). Tiga hal tersebut di atas adalah penyebab tidak mungkin tercapainya tujuan pengembangan kurikulum 2013 yang dimaksud menyiapkan anak-anak untuk siap bersaing secara global.

Sebagaimana layaknya proses perubahan kurikulum, *riset* seharusnya menjadi kegiatan awal yang melandasi perlunya perubahan kurikulum. *Riset* ini harus melihat

bagaimana kurikulum yang sebelumnya diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur yang mendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan. Penelitian lebih jauh mengenai pola mengajar guru harusnya merupakan prioritas utama agar apapun perubahan yang akan dilakukan dapat diperkirakan persiapannya. Mengingat tingkat keragaman pola pendidikan formal yang tinggi di Indonesia juga perlu dilakukan penelitian mengenai kesamaan dan perbedaan antara pola yang satu dengan lainnya. Misalnya, persamaan dan perbedaan antara guru yang mengajar di daerah terpencil dan di kota, atau antara yang mengajar di satu jenis sekolah RSBI, SSN, dan sekolah regular. Dengan adanya penelitian maka bisa diharapkan perencanaan perubahan menjadi realistis dan akhirnya dapat diimplementasikan dengan tingkat hambatan yang rendah. Jika diasumsikan bahwa dengan dibuatkan silabus dari pusat guru akan tidak mengalami kesulitan lagi adalah sebuah ungkapan yang terlalu menyederhanakan keberhasilan proses pembelajaran, Akankah dengan silabus yang sudah siap akan serta merta membuat guru mampu membawakannya di kelas ? Belum tentu. Jika sekedar dokumennya yang siap bukan menjadi jaminan bahwa guru akan otomatis mengerti bagaimana mengimplentasikan di kelas. Sebagai contoh adalah dengan kurikulum KTSP, walaupun guru kesulitan mengembangkannya, dokumen KTSP rata-rata ada di sekolah. Dokumen tersebut rata-rata adalah dikembangkan oleh penerbit yang memproduksi buku ajar yang dipakai oleh sekolah namun tetap saja dokumen KTSP tidak menjadi rujukan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. **faktor komunikasi**, dimana sosialisasi dan pelatihan para guru tentang kurikulum 2013 tersebut masih belum efektif. Masih banyak guru yang belum dapat memahami hakikat dan esensi dari kurikulum 2013 bahkan masih banyak guru yang belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum 2013 tersebut. Sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013 kepada para guru SMPN 10 kota Pontianak belum semua guru mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum 2013. Guru-guru yang belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kota Pontianak dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di SMPN 10 kota Pontianak mengkondisikan diri mereka dengan kurikulum yang baru ini. Mereka saling bertanya dan saling bertukar informasi sesama guru dan mencari tahu lewat internet tentang kurikulum 2013 tersebut. Mereka berinisiatif mencari perangkat belajar sendiri. Walaupun sebagian guru SMPN 10 kota Pontianak yang sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013 namun mereka masih belum paham benar dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan sewaktu sosialisasi dan pelatihan materi yang diberikan masih ngambang kurang jelas. Guru-guru yang mendapatkan pelatihan masih bingung apalagi yang belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tersebut. Mereka sambil berjalan terus mempelajari dan memahami kurikulum 2013 ini. Pada tahun pertama ini SMPN 10 Pontianak menjadi salah satu sekolah sasaran yang sudah *diffollowting* oleh Dikbud kota Pontianak untuk mengimplementasikan kebijakan kurikulum pendidikan nasional yang baru yaitu kurikulum 2013. Jadi sekarang ini masih dalam tahap belajar dan penyesuaian.

- b. **faktor sumber daya**, dimana kompetensi guru SMPN 10 kota Pontianak sebagai implementor kurikulum 2013 masih banyak yang kurang. Ada beberapa kompetensi guru yang tidak sesuai dengan tenaga kependidikan (PTK). Sarana dan prasarana pembelajaran masih relatif sederhana. Media pembelajaran di kelas masih dominan menggunakan *white board* dan spidol serta papan tulis dan kapur. Alat pembelajaran elektronik seperti infokus, *tape recorder*, *cd*, laptop dan lain sebagainya hampir jarang digunakan dalam pembelajaran dikelas. Metode pembelajaran yang dipakai di dalam di kelas tergantung materi bisa metode tanya jawab, pengamatan dan diskusi. Untuk keterampilan siswa bisa model presentasi. Konsep yang terpenting dalam pembelajaran di kelas adalah mendekati siswa yaitu metode pendekatan. Metode pembelajaran kurikulum 2013 ini adalah metode pembelajaran saintifik. Metode pembelajaran saintifik adalah Pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir sains, dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/ penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*). (Permendikbud Nomor 65 tahun 2013)
- b. Menurut semua guru SMPN 10 Pontianak tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sangat penting karena RPP untuk mempermudah pembelajaran di kelas. Dalam implementasi kurikulum 2013 di SMPN 10 Pontianak terdapat kendala yaitu antara lain masalah waktu. Guru merasa masih kekurangan waktu dalam proses pembelajaran dalam pemberian dan pembahasan materi di kelas. Di samping dari kendala waktu dalam pemberian materi yaitu kendala cara atau metode pembelajaran karena merubah dari siswa pasif menjadi siswa yang aktif. Teknik penilaian dalam pengisian rapor terlalu ribet tidak simpel. Guru masih bingung dalam membuat instrumen penilaian sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor) setiap siswa, disamping itu pemahaman guru masih belum maksimal tentang silabus dan membuat RPP. Guru masih bingung membuat soal dari materi. Terlepas dari semua kendala atau kesulitan yang dihadapi guru di lapangan namun guru harus dukung kebijakan pemerintah. Siap tidak siap harus dilaksanakan. Dari pihak siswa tidak ada kesulitan dalam perubahan kurikulum ini. Untuk penilaian kognitif atau pengetahuan semua mata pelajaran harus tuntas, jika tidak tuntas harus diberikan remedial. Hal ini sudah dilakukan oleh semua guru.
- c. **faktor disposisi**, dimana ada beberapa guru SMPN 10 Pontianak memiliki perspektif yang berbeda tentang kurikulum 2013. Beberapa guru masih menerapkan metode lama dalam pembelajaran karena merubah *mindset* guru dari kurikulum lama ke kurikulum 2013 butuh waktu yang lama. Hal ini

sangatlah wajar dimana kurikulum 2013 ini masih baru diimplementasikan di SMPN 10 Pontianak. Implementasi kurikulum 2013 di SMPN 10 Pontianak bisa efektif atau tidak tergantung gurunya juga karena tidak semua guru berpandangan yang sama, ada yang optimis, ada yang tidak peduli tentang kurikulum itu sendiri yang penting tugas mengajar selesai. Dilihat dari segi siswa sendiri apakah mereka sudah siap dari disuapi menjadi makan sendiri istilah seperti itu. Kelebihan kurikulum 2013 ini siswa lebih terukur kemampuannya. Masih diperlukan peran aktif guru dalam proses belajar mengajar agar situasi kelas tenang dan tertib.

- d. **faktor struktur birokrasi**, Standar operasional prosedur (SOP) kurikulum 2013 yang masih banyak belum dipahami oleh para guru untuk diimplementasikan di lapangan seperti standar penilaian sikap (afektif) dan penilaian keterampilan (psikomotor) setiap siswa serta penilaian di rapor yang masih banyak belum dipahami para guru, dimana para guru SMPN 10 Pontianak masih kesulitan dalam penilaian aspek afektif (sikap) dan aspek psikomotor (keterampilan) setiap siswa di kelas karena belum ada format yang baku dalam penilaian dan belum ada standar diskripsi penilaian di rapor sehingga guru membuat diskripsi dengan kalimat masing-masing untuk penilaian di rapor. Dalam hal pengisian rapor berbeda dengan rapor sebelumnya yang menggunakan angka-angka sedangkan di rapor kurikulum 2013 ini menggunakan huruf. Para guru wali kelas mendapat kesulitan di bagian pendiskripsian pengetahuan, sikap dan keterampilan setiap rapor siswa karena belum ada diskripsi yang baku dari dinas pendidikan kota Pontianak sehingga para guru wali kelas memakai kalimat sendiri di rapor tersebut. Belum ada keseragaman diskripsi di rapor. Rapor kurikulum 2013 menurut para guru terlalu panjang isinya karena ada beberapa penilaian yang harus dinilai dari setiap siswa. Rencana Pembelajaran yaitu silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selalu diusahakan lengkap dengan berbagai cara baik itu *download* dari internet, dapat dari pelatihan. Namun sejauh ini rencana pembelajaran tersebut masih dalam tataran dokumen bukan menjadi *guide* pelaksana pembelajaran di kelas.

2. Saran

- a. Diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kota Pontianak untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013 kepada semua guru tanpa terkecuali apakah guru tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan PNS ataupun honorer.
- b. Diharapkan para guru SMPN 10 Pontianak bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih tepat dalam kurikulum 2013, menggunakan alat ajar yang lebih tepat dan lebih efektif seperti memakai alat bantu seperti Laptop, infokus, CD dan lain sebagainya. Diharapkan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pontianak segera melengkapi buku pegangan guru dan buku-buku teks pelajaran kurikulum 2013 dan pemerintah kota Pontianak dapat membantu melengkapi sarana dan prasarana belajar SMPN 10 kota Pontianak dan kepada seluruh *stakeholders* untuk terus mendukung kurikulum 2013 agar tujuan kurikulum 2013 dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Dan diharapkan para guru bisa terus meningkatkan kompetensinya.

- c. Agar implementasi kurikulum 2013 dapat berjalan efektif diharapkan para guru, manajemen sekolah SMPN 10 kota Pontianak dan pengawas dari Dinas Pendidikan kota Pontianak lebih dapat menyentuh pada perubahan paradigma pembelajaran daripada mementingkan pada pembaharuan dan penyelesaian dokumen kelengkapan kurikulum saja. Diharapkan agar guru-guru SMPN 10 kota Pontianak secara perlahan dapat merubah *mindset* dalam proses pembelajaran agar kurikulum 2013 ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah dan semua pihak.
- d. Materi pelatihan dan standar operasional prosedur (SOP) seperti format penilaian sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor) setiap siswa serta diskripsi pengisian rapor agar lebih jelas dan distandarkan. Agar dibuat aplikasi penilaian sikap (afektif) pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) yang baku sehingga para guru akan lebih mudah dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di dalam kelas.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin (2012), *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo (2006), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Bungin, Burhan (2008), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Chan, Sam M dan Sam, Tuti T (2011), *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Dakir (2010), *Perencanaan & Pengembangan Kurikulum*, Jakarta : Rineka Cipta
- Danim Sudarwan (2006), *Agenda Pembaharuan Sistem pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dunn, William N (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Hamid, Hamdani (2012), *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia
- Hidayat, Sholeh (2013), *Pengembangan Kurikulum Baru*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Hamalik, Oemar (2007), *Implementasi Kurikulum*, Bandung : Yayasan Al-Madani
- (2010), *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- (2013), *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- (2013), *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta : Bumi Aksara
- Kunandar (2009), *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Majid, Abdul (2012), *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E (2009), *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara

- Nasution, S (2011), *Asas-Asas Kurikulum*, Jakarta : Bumi Aksara
- (2012), *Kurikulum & Pengajaran*, Bandung : Bumi Aksara
- Nogi S. Tangkilisan, Hessel (2003), *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*, Yogyakarta : Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Riduan (2004), *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : Alfabeta
- (2010), *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung : Alfabeta
- Silalahi, Ulber (2012), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama
- Solihatin, Etin (2012), *Strategi Pembelajaran PPKn*, Jakarta : Bumi Aksara
- Subarsono, AG (2006), *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- (2012), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta
- Suhartono, Edi (2012), *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Syaodih Sukmadinata, Nana (2011), *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Tachjan (2008), *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : Truenrth AIPI
- Tohardi, A (2010), *Metode Penelitian Sosial*, Pontianak : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura
- Widoyoko, Eko Putro (2009), *Evaluasi Program Pembelajaran*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Undang-Undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional dan PP NO. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional*, Jakarta : Permata Press : 2013
- Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dilengkapi Peraturan Perundangan yang Terkait*, Bandung : Nuansa Aulia : 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional*, Jakarta : Permata Press : 2013
- Permendikbud Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah*
- Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum*
- Perundangan tentang Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional 2013*, Jakarta : Pustaka Yustisia : 2013